



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : STAF AHLI  
**SUB UNIT KERJA** : STAF AHLI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **BANUN HARPINI**
2. Jabatan : **STAF AHLI MENTERI BIDANG PERDAGANGAN DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**
3. NHK : **26889**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.310.082.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/90 m2 di KOTA SURABAYA ,  
HASIL SENDIRI Rp. 232.092.000
2. Tanah Seluas 249 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL  
SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 390 m2 di JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp.  
2.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/286 m2 di KOTA JAKARTA  
SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 249 m2/45 m2 di SIDOARJO, HASIL  
SENDIRI Rp. 10.000.000
6. Bangunan Seluas 52 m2 di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL  
SENDIRI Rp. 580.000.000
7. Bangunan Seluas 47 m2 di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL  
SENDIRI Rp. 560.000.000
8. Tanah Seluas 31.5 m2 di KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp.  
175.490.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 1.168.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS SEDAN Tahun 2007, HASIL  
SENDIRI Rp. 230.000.000



2. MOBIL, TOYOTA HARDTOP JEEP Tahun 1980, HASIL SENDIRI  
Rp. 78.000.000
3. MOBIL, NISSAN SERENA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI  
Rp. 325.000.000
4. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2012, HASIL  
SENDIRI Rp. 535.000.000

<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	<b>100.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	<b>6.440.270.744</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	<b>11.018.352.744</b>
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	---
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	<b>11.018.352.744</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **29 Juni 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.